

## Analisis Alur Informasi dan Pengelolaan Data Kinerja e-SAKIP Sekretariat Daerah Kota Palembang

Latif Nurakhman<sup>1\*</sup>, Gusmelia Testiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>2</sup> Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>1\*</sup> [ltfhrmn@email.com](mailto:ltfhrmn@email.com), <sup>2</sup> [gusmeliatestiana@radenfatah.ac.id](mailto:gusmeliatestiana@radenfatah.ac.id)

### Abstrak

Penerapan e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik) di lingkungan pemerintah daerah menuntut kualitas alur informasi dan pengelolaan data kinerja yang terstandar. Penelitian ini menganalisis alur informasi pengelolaan data kinerja dalam mendukung penerapan e-SAKIP pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang menggunakan analisis komponen sistem informasi Input-Process-Output (IPO) dan analisis kualitas data. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus melalui observasi, wawancara mendalam dengan tiga informan yang terdiri dari Kepala Subbagian dan dua staf pengelola data, serta dokumentasi selama periode Juli–Agustus 2025. Hasil penelitian mengidentifikasi tujuh tahapan alur informasi dengan dua titik kritis: ketidakseragaman format data pada tahap input dan bottleneck verifikasi manual pada tahap proses. Ditemukan empat permasalahan yang saling berkaitan secara kausal: ketidakseragaman format data dari unit kerja, proses verifikasi manual yang lambat, koordinasi pengumpulan data yang bersifat informal, dan ketergantungan pada tacit knowledge individu tanpa prosedur operasional standar terdokumentasi. Pemanfaatan fitur monitoring berkala e-SAKIP yang masih terbatas mengindikasikan kesenjangan antara kapasitas teknis sistem dan pola kerja aktual pengguna yang dapat dijelaskan melalui kerangka Technology Acceptance Model. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kesenjangan antara kapasitas teknis e-SAKIP dan kesiapan proses bisnis di tingkat unit kerja, serta memberikan rekomendasi berbasis analisis kausal untuk perbaikan alur informasi kinerja pada instansi pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** e-SAKIP, Alur Informasi, Analisis IPO, Kualitas Data, e-Government

### PENDAHULUAN

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja berbasis elektronik merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan, serta rewiu dan evaluasi kinerja (Republik Indonesia, 2014). Transformasi SAKIP menuju platform elektronik yang dikenal sebagai e-SAKIP merupakan manifestasi konkret kebijakan e-government dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Twizeyimana & Andersson, 2019).

Keberhasilan implementasi e-SAKIP tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur teknologi. Efektivitas sistem informasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas proses bisnis dan pengelolaan data yang mendasarinya (Laudon & Laudon, 2020). Sistem yang secara teknis canggih dapat menjadi tidak efektif apabila data yang dimasukkan tidak terstandar, koordinasi antar unit kerja lemah, dan prosedur pengelolaan tidak terdokumentasi secara formal. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi persoalan ketidakseragaman data antar instansi sebagai isu nasional melalui kebijakan Satu Data Indonesia, yang mewajibkan pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data antar instansi pusat dan daerah (*Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia*, 2019). Ini mengindikasikan bahwa persoalan inkonsistensi format data bukan semata fenomena lokal, melainkan tantangan struktural yang dihadapi pemerintah daerah secara umum.

Pemerintah Kota Palembang telah mengimplementasikan e-SAKIP sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola pemerintahannya. Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian, sistem e-SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang telah beroperasi dan mengalami pengembangan fitur secara berkala. Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan unit sentral dalam proses pengelolaan data kinerja yang bermuara pada sistem e-SAKIP, sekaligus menghadapi permasalahan yang belum mendapat perhatian akademis yang memadai.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi SAKIP di pemerintah daerah umumnya berfokus pada evaluasi makro capaian nilai SAKIP atau pengukuran kepuasan pengguna sistem secara kuantitatif (Monalisa et al., 2022). Belum terdapat studi yang secara khusus menganalisis alur informasi pengelolaan data kinerja pada tingkat unit kerja menggunakan pendekatan komponen sistem informasi Input-Process-Output (IPO) dengan perspektif analisis kualitas data. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi landasan dan urgensi dilaksanakannya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan alur informasi pengelolaan data kinerja dari tahap pengumpulan hingga penginputan ke sistem e-SAKIP; (2) menganalisis proses pengelolaan data kinerja berdasarkan komponen IPO; serta (3) mengidentifikasi kendala dan memberikan rekomendasi perbaikan alur informasi guna mendukung efektivitas penerapan e-SAKIP.

## METODE

### Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui lima tahapan berurutan. Pertama, penentuan lokasi dan unit analisis, yaitu Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang, dipilih karena unit ini merupakan simpul utama pengelolaan data kinerja menuju e-SAKIP. Kedua, penentuan informan dan penyusunan instrumen wawancara semi-terstruktur berdasarkan kerangka IPO, dimensi kualitas data, dan konstruk Technology Acceptance Model. Ketiga, pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi selama periode Juli–Agustus 2025. Keempat, triangulasi data dengan mengonfirmasi silang temuan wawancara terhadap hasil observasi dan dokumen, untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan. Kelima, analisis data menggunakan pendekatan IPO untuk memetakan alur informasi ke dalam komponen Input-Process-Output, dilanjutkan dengan analisis kualitas data pada tiap komponen serta interpretasi melalui kerangka manajemen pengetahuan dan Technology Acceptance Model. Tahapan ini dirangkum pada uraian berikut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Yin, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam fenomena alur informasi dan pengelolaan data kinerja yang berlangsung dalam konteks spesifik suatu unit kerja pemerintahan (Creswell & Creswell, 2018). Lokasi penelitian adalah Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang, dengan periode penelitian Juli–Agustus 2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yang saling melengkapi: (1) observasi langsung terhadap proses kerja pengelolaan data kinerja selama pelaksanaan kerja praktik; (2) wawancara mendalam dengan tiga informan, yaitu Kepala Subbagian dan dua staf pengelola data pada fungsi Pengelola Data dan Pelaporan serta fungsi Pengelola Perencanaan yang terlibat langsung dalam pengelolaan data kinerja, menggunakan panduan wawancara semi terstruktur dengan durasi rata-rata 15 menit per sesi termasuk pertanyaan mengenai persepsi kemudahan dan manfaat penggunaan fitur e-SAKIP sebagai dasar interpretasi pada kerangka Technology Acceptance Model; dan (3) dokumentasi berupa dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA), laporan kinerja (LKjIP), dan dokumen Perjanjian Kinerja yang diizinkan oleh instansi. Seluruh proses pengumpulan data dilaksanakan selama periode Juli–Agustus 2025.

Analisis data dilakukan menggunakan dua kerangka analitik yang saling melengkapi: (1) analisis komponen sistem informasi Input-Process-Output (IPO) untuk memetakan alur pengelolaan data kinerja secara sistematis; dan (2) analisis kualitas data berdasarkan empat dimensi (Ridzuan & Wan Zainon, 2024) akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan ketepatan waktu untuk mengidentifikasi permasalahan pada setiap tahapan alur. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber (observasi, wawancara, dan dokumentasi) sebagaimana direkomendasikan oleh (Yin, 2018). Proses triangulasi dilakukan dengan mengkonfirmasi setiap temuan dari wawancara dengan bukti dari observasi lapangan dan/atau dokumen institusional sebelum dikategorikan sebagai temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Alur Informasi Pengelolaan Data Kinerja

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi, alur informasi pengelolaan data kinerja pada Bagian Perencanaan dan Keuangan berlangsung melalui tujuh tahapan yang saling berkaitan: (1) penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA, DPA, dan Perjanjian Kinerja); (2) koordinasi pengumpulan data realisasi dengan seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah; (3) penerimaan data dari unit kerja; (4) verifikasi dan validasi data; (5) rekapitulasi dan pengolahan data; (6) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP); serta (7) penginputan data ke sistem e-SAKIP. Dua titik kritis teridentifikasi pada Tahap 3 dan Tahap 4 yang secara langsung memengaruhi efektivitas keseluruhan alur, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur Informasi Pengelolaan Data Kinerja e-SAKIP pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang



Sumber: Hasil Analisis data primer penelitian (2025)

## 2. Analisis Input: Akar Permasalahan pada Sumber Data

Temuan paling signifikan pada tahap input adalah ketidakseragaman format data yang diterima dari unit kerja. Berdasarkan observasi lapangan, data realisasi kinerja yang dikirimkan dari bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah menggunakan format yang bervariasi, meliputi Microsoft Excel, dokumen Word, dan laporan cetak yang harus dialih-tuliskan secara manual. Kondisi ini secara langsung melanggar dimensi konsistensi dalam kualitas data sebagaimana dikemukakan (Ridzuan & Wan Zainon, 2024).

Dalam kerangka IPO, ketidakseragaman format di tahap input merupakan akar masalah yang berdampak berantai ke seluruh tahapan selanjutnya. Setiap format berbeda memerlukan perlakuan tersendiri sebelum dapat diintegrasikan ke dalam rekap terpadu, sehingga beban transformasi data yang seharusnya ditangani oleh sistem justru dipindahkan sepenuhnya kepada pengguna. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar efisiensi sistem informasi yang menyatakan bahwa standarisasi input merupakan prasyarat efektivitas keseluruhan sistem (Laudon & Laudon, 2020). Pemerintah Indonesia sendiri telah mengakui urgensi permasalahan ini melalui kebijakan Satu Data Indonesia yang secara eksplisit mewajibkan standarisasi format dan interoperabilitas data lintas instansi (*Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia*, 2019). Kajian interoperabilitas data di pemerintah daerah Indonesia mengonfirmasi bahwa heterogenitas format data antar unit kerja merupakan hambatan nyata bagi konsolidasi dan validasi data kinerja yang andal (Bappenas, 2024).

Absennya standar pengumpulan data yang ditetapkan dan diwajibkan secara formal mengindikasikan kelemahan tata kelola data pada level organisasi. Dalam literatur manajemen proses bisnis, standarisasi format data dipandang sebagai intervensi fundamental yang tidak dapat digantikan oleh peningkatan kapasitas di tahap proses, karena perbaikan di hilir tanpa menyelesaikan masalah di hulu hanya mengatasi gejala, bukan penyebabnya (Dumas et al., 2018; Janssen et al., 2020).

## 3. Analisis Proses: Bottleneck Verifikasi Manual

Tahap pengolahan data merupakan tahap yang paling banyak mengonsumsi waktu dan tenaga dalam keseluruhan alur. Terdapat lima sub-proses yang harus dilalui secara berurutan: (1) pemeriksaan kelengkapan data; (2) verifikasi kesesuaian realisasi dengan target dalam DPA dan Perjanjian Kinerja; (3) penyesuaian format data secara manual; (4) rekapitulasi capaian per indikator; dan (5) penyusunan narasi analisis capaian. Seluruh sub-proses dilakukan menggunakan Microsoft Excel tanpa dukungan otomatisasi validasi, sebagaimana teridentifikasi dari hasil observasi langsung selama penelitian.

Penting untuk dipahami bahwa lamanya proses verifikasi bukan merupakan penyebab primer permasalahan, melainkan akibat langsung dari ketidakseragaman format di tahap input. Setiap format tidak seragam memaksa staf melakukan penyesuaian manual sebelum verifikasi substantif dapat dimulai. Dengan demikian, bottleneck sesungguhnya berada di hulu (tahap input), bukan di tengah proses. Pendekatan perbaikan yang tepat adalah mengatasi akar masalah melalui standarisasi input, bukan sekadar menambah kapasitas verifikasi (Dumas et al., 2018). Kondisi ini berisiko terhadap akurasi data akibat

human error yang inheren dalam pekerjaan manual berulang, sekaligus menghambat dimensi ketepatan waktu kualitas data (Ridzuan & Wan Zainon, 2024).

#### **4. Analisis Output: Kualitas dan Konsistensi Hasil**

Output yang dihasilkan dari proses pengelolaan data mencakup: LKjIP Sekretariat Daerah Kota Palembang, data capaian kinerja yang diinput ke sistem e-SAKIP, dan informasi kinerja untuk monitoring internal. Secara formal, output tersebut telah memenuhi persyaratan pelaporan yang ditetapkan dalam Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014. Namun, proses yang sangat bergantung pada individu tertentu tanpa prosedur terstandar berpotensi menghasilkan variasi kualitas output antar periode pelaporan—bergantung pada kapasitas individu yang mengerjakannya pada periode tersebut. Kondisi ini merupakan risiko terhadap dimensi konsistensi dan akurasi output dalam perspektif kualitas data (Ridzuan & Wan Zainon, 2024).

#### **5. Permasalahan Koordinasi: Risiko Sistemik**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikonfirmasi dengan observasi lapangan, pengumpulan data realisasi dari unit kerja tidak memiliki jadwal baku yang ditetapkan secara resmi. Koordinasi berlangsung secara informal melalui komunikasi langsung antar staf, tanpa didukung surat edaran atau instruksi resmi pimpinan yang mengikat. Kondisi ini menciptakan risiko sistemik karena efektivitasnya sangat rentan terhadap dinamika hubungan personal, beban kerja yang bersaing, dan rotasi personel.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian tentang implementasi SAKIP di berbagai daerah, yang mengidentifikasi lemahnya koordinasi antar unit dan rotasi jabatan sebagai hambatan nyata yang berdampak pada kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (Ruscitasari & Nurul, 2023). Tidak adanya mekanisme koordinasi formal yang mengikat berakibat pada keterlambatan berulang setiap periode pelaporan pola yang berdasarkan temuan penelitian ini bersifat struktural, bukan insidental.

#### **6. Ketergantungan pada Tacit Knowledge: Kerentanan Organisasi**

Temuan yang paling berisiko dalam perspektif jangka panjang adalah ketergantungan proses pada tacit knowledge satu atau dua individu tertentu. Dari hasil observasi, tidak ditemukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mendokumentasikan langkah-langkah teknis pengelolaan data kinerja secara rinci. Pengetahuan tentang cara mengharmonisasi format data yang beragam, urutan verifikasi yang benar, dan teknis penginputan ke e-SAKIP sepenuhnya tersimpan pada individu bersangkutan.

Dalam perspektif manajemen pengetahuan, kondisi ini merupakan contoh klasik dari tacit knowledge yang belum dikonversi menjadi explicit knowledge (Lartey et al., 2022). Risiko organisasionalnya nyata: apabila individu tersebut berhalangan hadir atau mengalami rotasi jabatan, keseluruhan alur informasi kinerja berisiko terganggu atau terhenti. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip good governance yang mensyaratkan proses yang terdokumentasi, terstandar, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014. Studi tentang implementasi SAKIP di pemerintah daerah mengonfirmasi bahwa rotasi jabatan pada bagian perencanaan menjadi salah satu faktor penghambat konsistensi kualitas pelaporan kinerja.

#### **7. Kesenjangan Kapasitas e-SAKIP dan Pemanfaatan Aktual**

Temuan yang paling strategis dari perspektif sistem informasi adalah adanya kesenjangan antara kapasitas teknis e-SAKIP dan pemanfaatan aktualnya. Berdasarkan observasi, sistem e-SAKIP Kota Palembang telah dilengkapi dengan dashboard dan modul monitoring berkala, namun pemanfaatannya terbatas pada fungsi pelaporan akhir periode—setelah seluruh rekapitulasi selesai dilakukan secara offline menggunakan Microsoft Excel.

Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui kerangka Technology Acceptance Model (Nurdin et al., 2023): apabila pengguna tidak mempersepsikan manfaat nyata (perceived usefulness) dari fitur monitoring berkala dalam pekerjaan sehari-hari, fitur tersebut tidak akan dimanfaatkan meskipun tersedia secara teknis. (Tamilmani et al., 2021) mengembangkan perspektif ini lebih lanjut dalam UTAUT, menekankan bahwa faktor pengaruh sosial dan kondisi fasilitasi turut menentukan pola adopsi sistem. Kondisi ini merupakan manifestasi gap antara ketersediaan sistem dan utilisasi optimal yang teridentifikasi dalam berbagai studi e-government (Twizeyimana & Andersson, 2019). Secara potensial, pemanfaatan fitur input data berkala dapat mendistribusikan beban kerja sepanjang tahun sehingga mengurangi akumulasi beban di akhir periode pelaporan; namun pengukuran kuantitatif atas dampak tersebut memerlukan studi lanjutan di luar cakupan penelitian ini.

#### **8. Analisis Kausal: Hubungan Antar Temuan**

Keempat permasalahan yang teridentifikasi bersifat saling berkaitan dalam rantai kausal yang dapat dipetakan secara sistematis. Ketidakteragaman format data (masalah 1) secara langsung menyebabkan beban verifikasi manual berlebihan (masalah 2). Keduanya diperparah oleh koordinasi informal (masalah 3) yang mengakibatkan keterlambatan berulang dalam penerimaan data. Seluruh kondisi tersebut dipertahankan oleh ketergantungan pada tacit knowledge (masalah 4) yang membuat

perbaikan proses sulit dilakukan secara sistematis. Di atas semua itu, pemanfaatan e-SAKIP yang belum optimal menutup peluang untuk memotong rantai kausal ini melalui digitalisasi bertahap selama periode berjalan.

Analisis ini menunjukkan bahwa intervensi paling efisien adalah standardisasi format input sebagai titik intervensi hulu, karena perbaikan di titik ini berdampak positif berantai pada seluruh tahapan hilir. Temuan ini konsisten dengan prinsip Business Process Management yang menekankan penyelesaian akar masalah (root cause) daripada penanganan gejala (Dumas et al., 2018). Dari perspektif kualitas data (Ridzuan & Wan Zainon, 2024), intervensi pada dimensi konsistensi di tahap input akan sekaligus memperbaiki dimensi ketepatan waktu dan akurasi sebagai efek ikutan. Hubungan kausal antar permasalahan secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Permasalahan, Penyebab, Dampak, dan Hubungan Teori

N o.	Temuan	Penyebab	Dampak	Hubungan Teori
1.	Ketidakteraturan format data input	Tidak ada template baku resmi yang diwajibkan	Beban transformasi manual meningkat; konsistensi data terganggu	Ridzuan & Wan Zainon (2024)– dimensi konsistensi; Perpres No. 39/2019
2.	Verifikasi manual lambat (bottleneck)	Akibat langsung masalah 1; tidak ada validasi otomatis	Keterlambatan penyusunan LKjIP; risiko human error	Ridzuan & Wan Zainon (2024)– akurasi & ketepatan waktu; Dumas dkk. (2018)
3.	Koordinasi informal tanpa jadwal baku	Tidak ada surat edaran/instruksi resmi koordinasi data	Keterlambatan berulang; ketergantungan hubungan personal	Ruscitasari & Nurul (2023); Dumas dkk. (2018)
4.	Ketergantungan tacit knowledge individu	Tidak ada SOP terdokumentasi	Rentan rotasi jabatan; keberlanjutan proses tidak terjamin	Lartey et al. (2022)

Sumber: Hasil analisis data primer penelitian (2025)

### KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, alur informasi pengelolaan data kinerja pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang berlangsung melalui tujuh tahapan dengan dua titik kritis pada Tahap 3 (penerimaan data tidak seragam) dan Tahap 4 (bottleneck verifikasi manual). Kedua, analisis IPO mengungkap bahwa kelemahan fundamental terletak pada tahap input—ketidakteraturan format data yang secara kausal memperberat beban proses dan menghambat kualitas output pada dimensi ketepatan waktu dan konsistensi. Ketiga, terdapat empat kendala utama yang saling berkaitan dalam rantai kausal: ketidakteraturan format, verifikasi lambat, koordinasi informal, dan ketergantungan tacit knowledge, yang kesemuanya memperlemah pemanfaatan optimal e-SAKIP.

Implikasi teoretis penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi pemerintahan tidak cukup diukur dari ketersediaan teknologi, melainkan dari kesiapan proses bisnis dan kualitas data yang menopangnya perspektif yang konsisten dengan temuan dalam literatur e-government. Implikasi praktisnya adalah perlunya intervensi berlapis: standardisasi format input, formalisasi koordinasi, dokumentasi SOP, dan optimalisasi fitur monitoring berkala e-SAKIP.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan: (1) penyusunan dan penetapan template baku pengumpulan data realisasi kinerja yang diwajibkan seluruh unit kerja melalui surat edaran resmi; (2) penetapan jadwal koordinasi pengumpulan data secara formal dengan batas waktu mengikat setiap periode; (3) penyusunan SOP pengelolaan data kinerja secara tertulis untuk mengonversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge organisasi; (4) optimalisasi fitur dashboard dan monitoring berkala e-SAKIP melalui pelatihan teknis bagi seluruh staf yang terlibat; dan (5) penyelenggaraan transfer knowledge rutin agar kompetensi pengelolaan data kinerja tidak terpusat pada individu tertentu.

Penelitian lanjutan disarankan mengkaji efektivitas penerapan e-SAKIP menggunakan pendekatan kuantitatif seperti UTAUT atau DeLone dan McLean Information System Success Model, serta membandingkan kondisi di Sekretariat Daerah

Kota Palembang dengan daerah yang memiliki nilai SAKIP kategori A untuk mengidentifikasi praktik terbaik pengelolaan data kinerja.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang atas izin dan dukungan selama pelaksanaan Kerja Praktik, serta kepada dosen pembimbing lapangan atas arahan dan bimbingan dalam penyusunan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2024). *Kajian interoperabilitas data pemerintah daerah Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>
- Janssen, M., Brous, P., Estevez, E., Barbosa, L. S., & Janowski, T. (2020). Data spaces: Fundamentals of interoperable and trusted data ecosystems. *Government Information Quarterly*, 37(1), 101479. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101479>
- Lartey, P. Y., Shi, J., Santosh, R. J., Afriyie, S. O., Gumah, I. A., Husein, M., & Bah, F. B. M. (2022). Importance of organizational tacit knowledge: Barriers to knowledge sharing. In *Recent Advances in Knowledge Management*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.102478>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson Education.
- Monalisa, S., Susanto, H., & Ahmad, I. (2022). Analisis efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). *Journal Public Uho*, 7(2), 281–296. <https://journalpublicuho.uho.ac.id>
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2023). Influence of organizational factors in the sustainability of e-government: A case study of local e-government in Indonesia. *Journal of Computer Information Systems*, 63(2), 197–209. <https://doi.org/10.1080/08874417.2021.1978346>
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (2019). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ridzuan, F., & Wan Zainon, W. M. N. (2024). A review on data quality dimensions for big data. *Procedia Computer Science*, 234, 341–348. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.065>
- Ruscitasari, F. W., & Nurul, A. (2023). Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7(4), 285–302. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i4.64455>
- Tamilmani, K., Rana, N. P., Wamba, S. F., & Dwivedi, R. (2021). The extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT2): A systematic literature review and theory evaluation. *International Journal of Information Management*, 57, 102269. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102269>
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of e-Government: A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.